

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIMNOMOR : 06/Pid.S/2004/PN.MalangTENTANG PENGGUNAAN IJAZAH PALSUPADA PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF

 Oleh: ALFA PARAMASETHA (06400133)

law

Dibuat: 2010-10-21 , dengan 6 file(s).

Keywords: Putusan hakim, ijazah Palsu, anggota legislatif

ABSTRAKSI

Objek penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 06/Pid.S/2004/PN.Malang tentang penggunaan ijazah palsu pada pencalonan anggota legislatif dan bagaimanakah pertanggungjawaban calon anggota legislatif dalam penggunaan ijazah palsu pada pencalonan anggota legislatif.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, jenis data berupa hasil penelitian dan pengamatan di lapangan ditambah dengan peraturan perundang-undangan dan buku serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penggunaan ijazah palsu dan pertanggungjawaban calon anggota legislatif dalam penggunaan ijazah palsu pada pencalonan anggota legislatif,

Hasil analisa menunjukkan bahwa dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara penggunaan ijazah palsu tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Apabila kasus penggunaan ijazah palsu pada pencalonan anggota legislatif tersebut dilakukan pada waktu pencalonan anggota legislatif dan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak ijazah palsu tersebut digunakan, maka pelaku dipertanggungjawabkan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akan tetapi jika penggunaan ijazah palsu tersebut diketahui lewat waktu 3 (tiga) hari maka pelaku dipertanggungjawabkan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan jika kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat diterapkan barulah kembali ke Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hendaknya dalam membuat putusan tentang penggunaan ijazah palsu hakim harus menggunakan dasar-dasar pertimbangan yang sesuai dengan KUHAP dan undang-undang yang terkait, dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, kesesuaian dengan alat bukti, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Serta bukan hanya calon anggota legislatif yang dimintai pertanggungjawaban, melainkan juga partai politik yang bersangkutan mengingat partai politik sangat berperan dalam verifikasi pencalonan anggota legislatif.

ABSTRACT

The object of this research is the basic consideration in the decision of the judges Number: 06/Pid.S/2004/PN.Malang about using fake diplomas in the nomination of members of the legislature and how the accountability of legislative candidates in the use of fake diplomas in the nomination of members of the legislature.

This study uses sociological juridical approach, the type of data containing results of research

and field observations coupled with legislation and books and scientific papers relating to the use of fake diplomas and accountability in the use of legislative candidates for fake diplomas on the candidacy of legislative members.

Results of the analysis show that the basic consideration in examining judge and adjudicate these cases the use of fake diplomas is in conformity with the provisions of the Criminal Procedure Code. If cases of the use of fake diplomas in the nomination of members of the legislature was made at the time of the nomination of members of the legislature and reported to the Election Supervisory Committee within a period of 3 (three) days of fake diplomas is used, the perpetrator accountable based on Law Number 10 Year 2008 About the Election Members of the House of Representatives, Regional Representatives Council, and the Regional Representatives Council. However, if the use of fake diplomas are known by the time 3 (three) days of the perpetrator accountable based on Law Number 20 Year 2003 on National Education System. and if the two laws can not be applied before returning to the Book of Criminal Justice Act.

Should be in making decisions about the use of fake diplomas judges must use the basic consideration in accordance with the Criminal Procedure Code and related laws, the charges and the prosecutor general, compliance with evidence, and the things that lighten the burden and the defendant. And not only legislative candidates be held accountable, but also the political party since political parties play an important role in verifying the nomination of members of the legislature.

Keywords: Decision of justice, certificate forgery, member of the legislature.